

RENCANA KERJA 2021

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu kepada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD Kabupaten Padang Pariaman.

2021

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFOMARMATIKA
Kabupaten Padang Pariaman



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu kepada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD Kabupaten Padang Pariaman. Diharapkan nantinya RENJA 2021 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 ini.

Parit Malintang,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



ZAHIRMAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda. NIP. 19710524 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6

BAB II EVALUASI KINERJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD	7
2.2. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan	9
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	11
2.4. Permasalahan dan Hambatan.....	13
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja 2021	31
3.3. Rencana Program Dan Kegiatan 2021.....	33

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indicator kinerja sasaran
- Tabel 2. Identifikasi Kebijakan Nasional Kab. Padang Pariaman
- Tabel 3. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 serta rencana pendanaan indikatif
- Tabel 4. Matrik Renja Anggaran Tahun 2021 Permendagri 13
- Tabel 5. Matrik Renja Anggaran Tahun 2021 Pemetaan
- Tabel 6. Matrik Renja Anggaran Tahun 2021 Permedagri 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 pada dasarnya menindaklanjuti arahan dan petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja dimaksudkan bertujuan untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berhasil atau tidak melalui evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 serta Rancangan Akhir Renstra OPD Dinas Kominfo Tahun 2017-2021. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Kepala OPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan Rencana Kerja OPD yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip strategis, demokratis dan partisipatif, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Proses penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 didasarkan kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2021, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dilakukan secara sistematis

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimulai dengan pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, tujuan, sasaran, dan Program kegiatan, indikator kerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan dan diakhiri penutup.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Kabupaten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Laporan Kinerja (LK);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu, Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaa renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan.

BAB IV : Penutup, memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi referensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 yang meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program /kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman pada tahun lalu atau tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan

program/kegiatan berjalan dengan baik dan telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Namun demikian, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Lebih lanjut, jika dilihat dari aspek serapan (realisasi) keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 berdasarkan program, maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin), pagu anggaran sebesar Rp. 396.803.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 358.284.660,- Capaian kinerjanya sebesar 96,89%;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp. 301.815.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 300.708.621,- Capaian kinerjanya sebesar 99,63%;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.106.916,- Capaian kinerjanya sebesar 98,25%;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp. 67.455.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.052.800,- dengan Capaian kinerjanya sebesar 97,92%;
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp. 178.840.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 164.655.127,- Capaian kinerjanya sebesar 92,07%;
6. Program kerjasama informasi dengan Mass Media (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp. 395.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 392.738.100,- Capaian kinerjanya sebesar 99,18%;
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp. 3.486.667.116,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.476.668.032,- Capaian kinerjanya sebesar 99,71%.
8. Program pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp. 109.385.900,- dengan realisasi

sebesar Rp. 102.056.420,- Capaian kerjanya sebesar 93,30%.

2.2 Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Adanya efisiensi anggaran pada APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman, termasuk juga tingkat capaian kerjanya. Ada beberapa program/kegiatan yang capaian kerjanya tidak memenuhi target, yaitu:

A. Program Rutin

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin), pagu anggaran sebesar Rp. 396.803.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 358.284.660,- Capaian kerjanya sebesar 96,89%;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp. 301.815.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 300.708.621,- Capaian kerjanya sebesar 99,63%;

B. Program Operasional

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi anggaran Rp. 17.500.000,- dengan realisasi Rp. 17.317.800,- (92,07%). Fasilitasi Sistem Informasi dan Persandian Rp. 53.688.000,- dengan realisasi Rp. 44.645.069,- (83,16)

2. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1. Kegiatan Layanan Satu Data Padang Pariaman. Kegiatan ini dianggarkan dengan dana sebesar Rp. 79.128.400,-. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini hanya terealisasi sebesar Rp. 71.939.120,- dengan capaian kinerja (90,91%).

2.2.1 Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pada bahasan di atas telah dijelaskan bahwa adanya efisiensi

anggaran APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan - kegiatan di Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman. Kendatipun demikian, efisiensi anggaran tidak sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, sehingga capaian kinerja yang diharapkan telah memenuhi target yang ditetapkan. Oleh karena itu, selain dari kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, telah terealisasi sesuai target yang ingin dicapai.

2.2.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah :

1. Bahwa terdapat kegiatan dalam program yang tidak dianggarkan karena terbatas alokasi anggaran, sehingga mengurangi capaian program;
2. Bahwa terdapat pengurangan volume pengadaan barang atau jasa dalam program, karena disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia;
3. Keterbatasan kualifikasi dan kompetensi SDM bidang Teknologi informasi;
4. Kesalahan dalam perencanaan kegiatan oleh PPTK.

2.2.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Adanya efisiensi atau penghematan dalam penggunaan anggaran, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017-2021.

2.2.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya kegiatan yang tidak memenuhi target tetap diprioritaskan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;
2. Perubahan target capaian kinerja akhir periode Renstra;
3. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan;
4. Efisiensi alokasi belanja;
5. Penambahan alokasi pagu anggaran.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika sesuai indikator yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.22/PER/M.KOMINFO/12/2012 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Padang Pariaman.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 berdasarkan sasaran indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel 1. Penilaian capaian kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja 2019	Realisasi	
					Capaian	%
1	2	3	4	5		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik	Berkembangannya infrastruktur jaringan	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah mengimplementasikan teknologi informasi dengan tepat guna	65%(44 OPD, 10 UPT, Nagari 50)	65% (44 OPD, 5 UPT)	100%
	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan Pengamanan Informasi	Persentase Informasi Data yang dikelola	75%	75%	100%
	Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat 1	Cukup Informatif	65%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman yang tidak mencapai target hanya pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, hal ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman dalam penetapan dan menilai situasi dalam Penilaian secara periodik oleh evaluator terkait terhadap Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa secara umum kinerja pelayanan OPD Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD, maupun IKU OPD. Namun demikian, masih terdapat isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman terkait kinerja pelayanan OPD yaitu :

1. Padang Pariaman menuju “Smart City” atau Smart Region atau Daerah/Kota/kabupaten pintar;
2. Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang Komprehensif di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Integrasi SPBE se-Kabupaten Padang Pariaman

2.4 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika masih terbatas;
2. Masih terbatasnya pembinaan dan pemberdayaan Informasi yang terkait dengan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah baik melalui Media Berteknologi maupun melalui Media Tradisional;

2.4.1 Dampak Isu-isu strategis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang kominfo, yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui implementasi e-government maupun dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan Teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui penciptaan masyarakat informasi indonesia.

2.4.2 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan pelayanan adalah:

1. Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempuni, sehingga pelayanan informasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dan masyarakat kurang optimal;
2. Belum optimalnya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman;
3. Minimnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna;
4. Belum terintegrasinya sistem informasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke semua OPD, ataupun Kecamatan dan Nagari melalui aplikasi e-government;
5. Masih adanya daerah-daerah yang belum dapat mengakses jaringan komunikasi (blankspot), sehingga terjadinya kesenjangan Informasi di beberapa Wilayah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
6. Masih rendahnya pemahaman, penguasaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media komunikasi dalam rangka meningkatkan daya saing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini.

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman dari tantangan tersebut adalah :

1. Adanya peluang PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan bidang teknologi informasi yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Padang Pariaman dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Adanya peluang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sampai tingkat Kecamatan pada Kabupaten se- Padang Pariaman;
3. Adanya peluang untuk meningkatkan sarana dan prasarana

Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

4. Adanya peluang untuk mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke semua OPD, Kabupaten ataupun Kecamatan dan Desa melalui aplikasi e-government;
5. Adanya peluang untuk mengatasi akses jaringan komunikasi yang blankspot;
6. Adanya peluang untuk meningkatkan frekuensi sosialisasi dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat melalui pemanfaatan TIK di era Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini.

2.4.3 Formulasi isu-isu penting / rekomendasi

Dari penjabaran isu - isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut untuk alternatif /upaya pemecahan masalah tersebut, yaitu:

1. Perlunya mengikutsertakan PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan bidang teknologi informasi yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Padang Pariaman dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Perlunya meningkatkan volume kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
3. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
4. Perlunya membuat sistem aplikasi yang dapat mengintegrasikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke semua OPD, Kabupaten ataupun Kecamatan dan Desa;
5. Perlunya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk mengatasi akses jaringan komunikasi yang blankspot;
6. Perlunya meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi guna memberikan pemahaman, penguasaan dan kemampuan

masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan peralatan komunikasi di era MEA saat ini.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Dokumen perencanaan daerah terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen perencanaan tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja tahun 2021, Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman melakukan review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Berdasarkan hasil review tersebut, ternyata ada beberapa kegiatan yang perlu diakomodir dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki korelasi langsung terhadap akselerasi pencapaian visi dan misi yang telah digariskan. Hal ini tentunya sesuai dengan dinamika perkembangan kemajuan TIK dan tuntutan masyarakat akan pelayanan birokrasi yang semakin baik, cepat dan transparan. Pada Rancangan awal RKPD 2021 jumlah pendanaan indikatif sebesar **Rp. 14.027.498.220,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp. 6.637.953.400,-** dan Belanja Langsung **Rp. 7.389.544.820,-**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas dibidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut. Adapun Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah sebagai berikut :

Visi: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

3.1.1 Arah Kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian Kominfo RI

sebagai berikut:

Tabel 2.

Identifikasi Kebijakan Nasional Kabupaten Padang Pariaman

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatkan dan mengintegrasikan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2014-2019	
2	Mewujudkan sumber daya manusia yang inovatif melalui pembinaan kreatifitas dan peningkatan literasi TIK;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2014-2019	
3	Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing melalui pengembangan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal, serta memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2014-2019	
4	Memperkuat regulasi kominfo untuk menyongsong pertumbuhan teknologi dan kompetisi media;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2014-2019	
5	Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa.	APBN Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2014-2019	

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman menyesuaikan atau mensinkronisasikan dalam berbagai kebijakan strategis yaitu :

- 1. Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi melalui pemanfaatan teknologi broadband menuju terbentuknya masyarakat pengetahuan dalam kerangka NKRI, dilakukan melalui**

- :
- a. Meningkatkan diseminasi informasi melalui berbagai media komunikasi, seperti media ruang dalam (indoor) dan media luar ruang (baliho, spanduk, banner, billboard); Tradisional, televisi dan surat kabar dan tabloid Pemerintah dan media lainnya;
 - b. Mengkoordinasikan kelompok informasi masyarakat dengan lembaga-
lembaga informasi lainnya dalam rangka penyebaran informasi;
 - c. Meningkatkan pembinaan kepada kelompok informasi dan lembaga-
lembaga informasi lainnya dalam rangka pemberdayaannya untuk meneruskan informasi kepada masyarakat lingkungannya;

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang inovatif melalui pembinaan kreatifitas dan peningkatan literasi TIK, dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik;
- b. Peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi agar pelayanan informasi dapat diakses secara mudah oleh masyarakat;
- d. Peningkatan pelayanan informasi melalui media online;
- e. Pengembangan dan pemuktahiran data Website Sumut Online;
- f. Pemberdayaan dan pelayanan fasilitasi melalui audio visual, media cetak, layanan informasi / media center dan bank data;
- g. Pengembangan penyelenggaraan ke pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- h. Meningkatkan pelayanan e-governance dengan merata system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

3. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing melalui pengembangan system kominfo yang berbasis kemampuan lokal, serta memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam

sistem pasar global, dilakukan melalui :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan lembaga kominfo skala Kabupaten;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan program pemerintah;
- c. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan instansi kominfo kabupaten Padang Pariaman;
- d. Meningkatkan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan mitra lembaga pers dan penerbitan media;
- e. Meningkatkan pemberdayaan pendapat umum;
- f. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan Bakohumas Pemerintah dan Kabupaten serta Lembaga Kemasyarakatan, dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

4. Memperkuat regulasi kominfo untuk menyongsong pertumbuhan teknologi dan kompetisi media, dilakukan melalui:

- a. Melakukan pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi dan penerapan standar teknis dan standar pelayanan dalam bentuk sertifikat dan label yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel untuk alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala Kabupaten;
- b. Melakukan bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi;
- c. Melakukan pemetaan jaringan telekomunikasi, pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- d. Mengkoordinasikan pemberian ijin pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- e. Mengkoordinasikan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) dan pengawasan dalam rangka pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dan Universal Service Obligation (USO) di bidang telekomunikasi;
- f. Memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan media massa televisi; dan jaringan tetap local wireline (end to end), TV Cable cakupan Kabupaten.
- g. Mengkoordinasikan dan konsultasi dengan Pemerintah

Kabupaten, asosiasi dan masyarakat pos, telekomunikasi dan media massa penyiaran untuk bidang Pos dan Telekomunikasi.

5. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa, dilakukan melalui:

- a. Peningkatkan diseminasi informasi melalui media massa cetak dan elektronik (televisi, radio, surat kabar dan tabloid Pemerintah dan media lainnya)

3.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong terjadinya sharing / pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.
2. Program prioritas pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, yang menekankan masalah layanan, dan kandungan informasi, serta menjangkau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis local, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggali, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa informatif (information villages).
3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan pemerintahan (*e-government*) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government nasional, sekaligus bermanfaat

bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.

4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik, melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat. Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.

3.2 Pelaksanaan Rencana Kerja Ditahun berjalan/ Tahun 2020

Berdasarkan Renja 2020 yang sebelumnya telah di susun, Program dan Kegiatan yang sudah dan sedang terlaksana pada tahun 2020 di dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Padang Pariaman akan di jabarkan pada tabel berikut ini.

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RKPD PERUBAHAN 2020		
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
BELANJA			5.785.066.821	
BELANJA TIDAK LANGSUNG			2.230.887.121	
BELANJA LANGSUNG			3.554.179.700	
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		367.505.000	
Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Persentase Terbayarnya alat tulis kantor, perangk, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan	100%	23.600.000	DAU
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output: Persentase Terlaksananya Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK	100%	206.800.000	DAU
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output: Persentase Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor	100%	26.700.000	DAU
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output: Persentase Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	100%	1.500.000	DAU
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output: Persentase Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	DAU
Penyediaan makanan dan minuman	Output: Tersedianya makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor	300 Orang	16.905.000	DAU
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output: Terlaksananya kegiatan konsultasi/ koordinasi Dinas KOMINFO	25 Orang/Kegiatan	92.000.000	DAU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome: Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur		170.064.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas	Output : Tersedianya sepeda motor dinas	-	-	DAU
Pengadaan peralatan gedung kantor	Output: Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	10 Unit	46.904.000	DAU
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output: Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas kantor	2 Mobil Dinas	94.500.000	DAU
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output: Terlaksananya Pemeliharaan berkala Gedung kantor	2 Kegiatan	12.160.000	DAU
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output: Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	6.500.000	DAU
Pengadaan Meubiler Kantor	Output: Tersedianya Meubelier kantor	1 Unit	10.000.000	DAU
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome: Persentase peningkatan SDM dibidang informatika	-	-	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Output: Terlaksananya kegiatan bintek, sosialisasi dan implementasi perundang undangan bagi Dinas KOMINFO	-	-	DAU
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output: Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan Kompetensi ASN	-	-	DAU
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Outcome: Persentase pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu		67.200.000	DAU
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output: Jumlah laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip,LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan) yang disusun	6 Dokumen	67.200.000	DAU

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Outcome: Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi		2.676.673.200	
Pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan jaringan	Output: Jumlah Jaringan dan peralatan telekomunikasi yang terpelihara	1 Paket	45.100.000	DAU
Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi	Output: Tersedianya CCTV dan VOIP disetiap OPD	1 Paket	39.625.000	DAU
Penyediaan Jasa Bandwith/Internet Daerah	Output Tersedianya Akses Internet berkecepatan tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	12 Bulan	1.578.720.300	DAU
Pengembangan Infrastruktur data center	Output: Jumlah pengembangan data center	85 Persen	60.049.000	DAU
Pembangunan Comand Centre Padang Pariaman	Output: Pengembangan Prasarana Command Center Padang Pariaman	1 Paket	434.000.000	DAU
Pengembangan Sumber Daya Keamanan Sistem Informasi	Output: Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan keamanan informasi	-	-	DAU
Pembinaan layanan e-Government	Output: Jumlah pembinaan OPD Locus SPBE	12 Bulan	24.718.900	DAU
Pengembangan e-Gov dan Implementasi Smart City Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Output: Persentase Implementasi Masterplan Smart City	1 Paket	420.600.000	DAU
Penyediaan Colocation Server		12 Bulan	73.860.000	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Outcome: Jumlah Jenis Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik		112.382.500	DAU
Pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi masyarakat	Output: Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi Masyarakat			DAU

Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Output: Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi melalui PPID utama dan PPID pembantu	40 PPID	70.110.000	DAU
Pengawasan dan pengendalian Sarana telekomunikasi	Output: Jumlah Tower, Stasiun Radio/Televisi, Wartel/Warnet	12 Bulan	42.272.500	DAU
Pengelolaan media komunikasi publik *	Output: Tersedianya sarana studio dan jaringan Komunikasi Daerah di Kabupaten Padang Pariaman	-	-	DAU
Program Persandian untuk pengamanan informasi	Outcome: Persentase Sistem Informasi Daerah yang Telah Memiliki Keamanan Informasi		30.000.000	
Fasilitasi sistem informasi dan persandian	Output: Tersedianya peralatan dan sistem persandian yang terintegrasi	12 Bulan	30.000.000	DAU
Penyediaan Colocation Server	Output: Terkelolanya Server data Kabupaten Padang Pariaman di Colocation	-	-	DAU
Pengembangan layanan persandian untuk pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah*	Output: Terkelolanya sarana dan prasarana operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi	-	-	DAU
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Outcome: Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah		49.915.000	
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Output: Jumlah buku/laporan data statistik sektoral	-	-	DAU
Layanan Satu Data Padang Pariaman	Output: Terkelolanya data padang pariaman dalam sebuah sistim	12 Bulan	49.915.000	DAU
Program kerjasama informasi dengan mass media	Outcome: Jumlah kerjasama dengan mass media	-	80.440.000	
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Output: Jumlah publikasi Informasi pembangunan daerah	10 Publikasi	43.940.000	DAU

Diseminasi informasi pembangunan daerah	Output: Jumlah sarana informasi pembangunan daerah	10 Media	36.500.000	DAU
Kerjasama dengan media massa elektronik dan On-line	Output: Jumlah kerjasama dengan media elektronik	-	-	DAU
Fasilitasi Kunjungan Jurnalistik Kependidikan Kabupaten Padang Pariaman	Output: Jumlah wartawan yang melakukan Kunjungan Jurnalistik Kependidikan	-	-	DAU

Tabel 3. Matrik Renja Anggaran Tahun 2020

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

3.2.1 Tujuan Renja

Perumusan tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program, dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman untuk satu tahun mendatang. Secara khusus tujuan Rencana kerja didasarkan pada rumusan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman, khususnya terkait dengan permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Padang Pariaman, di antaranya :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan pelayanan informasi publik baik internal aparatur Kabupaten dan kabupaten apalagi pelayanan kepada masyarakat melalui penguasaan petunjuk pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam bidang Kominfo;
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
3. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitrakerja pos dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi;
4. Meningkatkan pemerataan akses informasi dan pemanfaatan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi.

3.3.2 Sasaran Renja

Berangkat dari tujuan, maka sasaran renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas SDM dan sarana prasarana infrastruktur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

dalam meningkatkan pelayanan informasi publik baik internal aparaturnya Kabupaten Padang Pariaman;

2. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
3. Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi.
4. Meningkatnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi.

3.3 Program dan Kegiatan

3.4.1 Faktor-Faktor Pertimbangan dalam Penyusunan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman TA. 2021

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap publik atau warga masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 f, yang berbunyi :
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
- Pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Padang Pariaman, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”.**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dilakukan berbagai upaya strategis sebagaimana dituangkan dalam misi. Ada 7 (Tujuh) misi yang ditetapkan dalam rangka menunjang keberhasilan visi. Dari ketujuh misi tersebut, misi yang relevan dengan eksistensi dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman adalah

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik (*good governance and clean governance*)”.

Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) dapat tercapai melalui upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; melalui penerapan *e-Gov. (e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-performance)*.

3.4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan adalah 5 (Lima) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Aplikasi Informatika ;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

Dari 5 (Lima) program tersebut, maka dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan relevansinya dengan kebutuhan dan urgensinya. Dalam rancangan renja Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021, total kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 29 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman TA. 2021 adalah sebesar **Rp. 4.869.222.279,-** Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dalam tabel berikut:

3.5 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan rekapitulasi program dan kegiatan tersebut, maka Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman TA. 2021 serta prakiraan maju Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dalam lampiran berikut.

TABEL 4 PRIORITAS PLAFON RENCANA PROGRAM 2021 PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PADANG PARIAMAN

Nomor Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI PENCAPAIAN RENJA TAHUN 2019 (%)	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
2.10.2.10.1.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	93%	98%	92%	95%	383.005.000	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transormasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.10.2.10.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangk, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	15 Item	23.600.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	25 Orang/bulan	206.800.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pemeliharaan dan kebersihan kantor	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	1 Orang/Bulan	26.700.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik kantor	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	5 Item	1.500.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	500 Orang	16.905.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan konsultasi/koordinasi Dinas KOMINFO	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	25 Orang/Kegiatan	100.000.000	Diskominfo	DAU			

2.10. 2.10.1. 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	92%	98%	95%	94%	253.160.000	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transormasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana
2.10. 2.10.1. 02. 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 Item	5 Item	5 Item	10 Item	75.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10. 2.10.1. 02. 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pembelian Meubeleur Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1 Unit	1 Unit	60.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10. 2.10.1. 02. 26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12.160.000	Diskominfo	DAU			
2.10. 2.10.1. 02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas kantor	1 Tahun	2 Mobnas	2 Mobnas	2 Mobnas	94.500.000	Diskominfo	DAU			
2.10. 2.10.1. 02. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung kantor	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	11.500.000	Diskominfo	DAU			
2.10. 2.10.1. 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan SDM dibidang informatika	92%	100%	92%	98%	50.000.000	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transormasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Peningkatan Kapasitas ASN
2.10. 2.10.1. 05. 03	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan Kompetensi ASN	1 Tahun	3 Orang / Kegiatan	-	3 Orang / Kegiatan	25.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10. 2.10.1. 05. 01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan bintek, sosialisasi dan implementasi perundang undangan bagi Dinas KOMINFO	1 Paket Kegiatan	3 Orang / Kegiatan	-	3 Orang / Kegiatan	25.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10. 2.10.1. 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	95%	100%	95%	95%	100.000.000	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transormasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan Capaian Kinerja SKPD

2.10.2.10.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Anggaran (RKA dan DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun dan Jumlah laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan) yang disusun	Laporan, dan Dokumen CAPKIN OPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Outcome: Jumlah Jenis Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	287.452.500	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas
2.10.2.10.1.15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi Masyarakat	15 KIM	1 KIM	1 KIM	1 KIM	75.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.15.07	Pusat Pelayanan Informasi Daerah	Jumlah Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi	Tersedia Informasi Publik	41 PPID	41 PPID	41 PPID	75.110.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.15.15	Fasilitasi Sistem Informasi dan Persandian	Jumlah peralatan dan sistem persandian yang terintegrasi	1 Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Layanan Operasional Persandian Daerah	41 OPD	41 OPD	41 OPD	75.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.15.18	Pengawasan dan Pengendalian Sarana Telekomunikasi	Jumlah Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana Telekomunikasi dan Sandi	140 Menara	50 Menara	150 Menara	150 Menara	62.342.500	Diskominfo	DAU			

2.10.2.10.1.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Jumlah kerjasama dengan mass media	10 Jenis	15 Media	15 Media	30 Media	155.000.000	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transormasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas
2.10.2.10.1.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	Publikasi 24 Program	20 Publikasi	10 Publikasi	10 Publikasi	75.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.18.07	Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sarana informasi pembangunan daerah	24 Unit Baliho, 48 Spanduk	2 Unit Baliho, 10 Lembar Spanduk	2 Unit Baliho, 10 Lembar Spanduk	10 Unit Baliho, 50 Lembar Spanduk	80.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.19	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase OPD yang sudah menerapkann e-government terintegrasi	95%	95%	75%	95%	3.505.604.779	Diskominfo	DAU	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	1. Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah.
2.10.2.10.1.19.06	Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Jaringan	Jumlah Jaringan dan peralatan telekomunikasi yang terpelihara	10 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	45.000.000	Diskominfo	DAU			2. Meningkatnya Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis E-Government.
2.10.2.10.1.19.09	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Tersedianya CCTV dan VOIP disetiap OPD	Semua OPD Kab. Padang Pariaman	41 OPD	41 OPD	41 OPD	54.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.19.10	Penyediaan Jasa Bandwith/ Internet Daerah	Jumlah Tersedianya Akses Internet berkecepatan tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	450 MBps	5 Mbps Internet, 10 Mbps Metro Per OPD	5 Mbps Internet, 10 Mbps Metro Per OPD	5 Mbps Internet, 10 Mbps Metro Per OPD	1.825.000.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.19.13	Pembangunan Comand Center Padang Pariaman	Jumlah Pengembangan Prasarana Command Center Padang Pariaman	10 Aplikasi	1 Paket Pengembangan Command Center	1 Paket Pengembangan Command Center	1 Paket Sapras Command Center	883.550.879	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.19.14	Penyediaan Colocation Server	Jumlah Akses Disaster Recovery Server/Mirroring Server	2 Rak Server	6 Rak Server Mirror	6 Rak Server Mirror	6 Rak Server Mirror	73.860.000	Diskominfo	DAU			
2.10.2.10.1.19.15	Pengembangan Sumberdaya Keamanan Sistem Informasi	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan keamanan informasi	20%	-	-	1 Paket CSCU	45.000.000	Diskominfo	DAU			

2.10 . 2.10.1 . 19 . 16	Pembinaan Layanan E Government	Jumlah pembinaan OPD Locus SPBE	2 Regulasi	10 OPD	11 OPD	11 OPD	70.493.900	Diskominfo	DAU			
2.10 . 2.10.1 . 19 . 17	Pengembangan E- Gov dan Implementasi Smart City Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Persentase Implementasi Masterplan Smart City	Pembinaan Sistem terintegrasi	10%	25%	50%	508.700.000	Diskominfo	DAU			
2.14 . 2.10.1 . 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah	15%	50%	75%	95%	135.000.000	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan data
2.14 . 2.10.1 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku/laporan data statistik sektoral	1 Dokumen	1 Buku	-	1 Paket Data Sektoral	60.000.000	Diskominfo	DAU			
2.14 . 2.10.1 . 15 . 06	Layanan Satu Data Padang Pariaman	Jumlah data Padang Pariaman Dalam Sebuah Sistem	5%	25%	50%	75%	75.000.000	Diskominfo	DAU			
2.14 . 2.10.1 . XX	PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Informasi Daerah yang telah memiliki keamanan informasi	50%	-	35%	45%	-	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengamanan Informasi
2.14 . 2.10.1 . XX.xx	Pengembangan Layanan Persandian untuk pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah	Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Operasional dan dukungan persandian untuk pengamanan Informasi	-	-	-	1 Paket Sarana dan Prasarana Layanan Operasional Persandian Daerah	-	Diskominfo	DAU			
TOTAL							4.869.222.279,00					

TABEL 5 PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PADANG PARIAMAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	RENCANA ANGGARAN 2022	KODE					
5	1	1			BELANJA TIDAK LANSUNG															
			01		Belanja Pegawai											X	X	01	202	
				01	Belanja Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN dan TPP	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Kominfo		3.500.000.000					01	
					BELANJA LANSUNG									4.869.222.279,00						
X	X	01			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kominfo		383.005.000,00	X	X	01	203		
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kominfo		23.600.000					203	01
				7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kominfo		206.800.000					203	07

				8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pemeliharaan dan kebersihan kantor	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kominfo		26.700.000				2	0	8
				12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik kantor	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kominfo		1.500.000				2	0	2
				15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kominfo		7.500.000				2	0	5
				17		Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kominfo		16.905.000				2	0	7
				18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan konsultasi/ koordinasi Dinas KOMINFO	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kominfo		100.000.000				2	0	8
X	X	2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Kominfo		253.160.000	X	X	0	2	0	3
				9		Pengadaan Mobil Jabatan	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan Kepala Dinas	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Kominfo		-				2	0	9
				X		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Operasional Dinas	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja	Kominfo		-				2	0	3

				3			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan bintek, sosialisasi dan implementasi perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan SDM dibidang informatika	Kominfo		25.000.000				2	0	4	1	
X	X	X	6				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaporan Kinerja dan Keuangan tepat waktu	Kominfo		100.000.000	X	X	0	1	2			
X	X	X	6	1	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, dan Renstra yang tersusun	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaporan Kinerja dan Keuangan tepat waktu	Kominfo		-				2			1	
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Anggaran (RKA dan DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan) yang tersusun	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaporan Kinerja dan Keuangan tepat waktu	Kominfo		65.000.000					2		2	
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Perangkat Daerah, (LAKIP, LPP D) yang disusun	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaporan Kinerja dan Keuangan tepat waktu	Kominfo		35.000.000					2		3	
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan Kinerja	Administrasi Keuangan		Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pelaporan Kinerja dan	Kominfo		-	X	X	0	1	2	0	2	6

										Daerah	Keuangan tepat waktu																									
X	X	X	1					PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD (Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan) yang disusun				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah	Statistik	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	135.000.000	2	2	0	2													2 . 0 1	
X	X	X	1	1	1			Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah buku statistik daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah	Statistik	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	60.000.000																		2 . 0 1	1
									Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah laporan data statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah	Statistik	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	-																		6	
						6		Layanan Satu Data Padang Pariaman	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah data padang pariaman dalam sebuah sistim	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	75.000.000	2	1	6	0	3													2	6

X	X	1					PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	287.452.500	2	1	0	2	0	1	
X	X	5	1	3			Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi masyarakat	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	75.000.000				2	0	1	0
				7			Pusat Pelayanan Informasi Daerah	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi melalui PPID utama dan PPID pembantu	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	75.110.000							6
				1			Fasilitasi Sistem Informasi dan Persandian	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah peralatan dan sistem persandian yang terintegrasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Informasi Daerah yang Telah Memiliki Keamanan Informasi	Persandian	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	75.000.000	2	2	0	2	0	1	3
				1			Pengawasan dan Pengendalian Sarana Telekomunikasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Sandi	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	62.342.500	2	1	0	2	0	2	0

X	X	1					PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah kerjasama dengan mass media	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	155.000.000	2	1	0	2				
	X	8																6	2	0	1			
X	X	1	1	1			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah publikasi Informasi pembangunan daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah kerjasama dengan mass media	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	75.000.000	2	1	0	2	1			
					7																1			
							Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sarana informasi pembangunan daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah kerjasama dengan mass media	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	80.000.000					2	0	1	5
						8																2	7	
							Kerjasama dengan Media Massa elektronik dan Online	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama dengan media elektronik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah kerjasama dengan mass media	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	-						0	1	
X	X	1					PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI					Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3.505.604.779	2	1	0	2				
		9																				0	1	

X	X	1	1	6		Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Jaringan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan dan peralatan telekomunikasi yang terpelihara	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	45.000.000				2	3
				9		Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan dan peralatan telekomunikasi yang terpelihara	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	54.000.000				2	3
				10		Penyediaan Jasa Bandwith/ Internet Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan dan peralatan telekomunikasi yang terpelihara	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	1.825.000.000				2	3
				12		Pengembangan Infrastruktur Data Center	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Peresentase pengembangan IDC Pemerintah Daerah	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	-				2	3

				1 3			Pembangunan Comand Center Padang Pariaman	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Pengembangan Prasarana Command Center Padang Pariaman	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	883.550.879				2 .0 2	8
				1 4			Penyediaan Colocation Server	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Akses Disaster Recovery Server/Mirroring Server	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	73.860.000				2 .0 2	3
				1 5			Pengembangan Sumberdaya Keamanan Sistem Informasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan keamanan informasi	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	45.000.000				2 .0 2	5
				1 6			Pembinaan Layanan E Government	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan OPD Locus SPBE	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	70.493.900				2 .0 2	1
								Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pembinaan OPD Locus SPBE	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	-				2 .0 2	7
				1 7			Pengembangan E-Gov dan Implementasi Smart City Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Implementasi Masterplan Smart City	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	508.700.000				2 .0 2	9

								Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah n Berbasis Elektronik	Persentase Implementa si Masterplan Smart City	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government yang terintegrasi	Kominfo	Urusan Pemerintah an Bidang Komunikas i Dan Informatik a	-					2 . 0 2	2
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	------------------------------------	---	---------	--	---	--	--	--	--	------------------	---

TABEL 6 PRIORITAS PLAFON RENCANA PROGRAM 2021 PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PADANG PARIAMAN

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2020					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
					TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (DISKOMINFO)						4.869.222.279					
						786.165.000					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	93%	98%	92%	95%	786.165.000			Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transormasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Keuangan						0					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN dan TPP				12 Bulan		Diskominfo	DAU			
Administrasi Umum						636.165.000					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangkat, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan				15 Item	23.600.000	Diskominfo	DAU			
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK				25 Orang/bulan	206.800.000	Diskominfo	DAU			
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pemeliharaan dan kebersihan kantor				1 Orang/Bulan	26.700.000	Diskominfo	DAU			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik kantor				5 Item	1.500.000	Diskominfo	DAU			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	7.500.000	Diskominfo	DAU			
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor				500 Orang	16.905.000	Diskominfo	DAU			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan konsultasi/ koordinasi Dinas KOMINFO				25 Orang/ Kegiatan	100.000.000	Diskominfo	DAU			

Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				10 Item	75.000.000	Diskominfo	DAU			
Pengadaan mebeleur	Jumlah pembelian Meubeleur Kantor				5 Item	60.000.000	Diskominfo	DAU			
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12 Bulan	12.160.000	Diskominfo	DAU			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas kantor				2 Mobnas	94.500.000	Diskominfo	DAU			
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung kantor				12 bulan	11.500.000	Diskominfo	DAU			
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						50.000.000					
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan Kompetensi ASN				3 Orang / Kegiatan	25.000.000	Diskominfo	DAU			
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan bintek, sosialisasi dan implementasi perundang undangan bagi Dinas KOMINFO				3 Orang / Kegiatan	25.000.000	Diskominfo	DAU			
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah						100.000.000					
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun.				4 Laporan	65.000.000	Diskominfo	DAU			
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Perangkat Daerah, yang disusun				4 Laporan	35.000.000	Diskominfo	DAU			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						3.948.057.279					
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	305.110.000	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transormasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						305.110.000					
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi Masyarakat				1 KIM	75.000.000	Diskominfo	DAU			
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi				41 PPID	75.110.000	Diskominfo	DAU			
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah				10 Publikasi	75.000.000	Diskominfo	DAU			

Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sarana informasi pembangunan daerah				10 Unit Baliho, 50 Lembar Spanduk	80.000.000	Diskominfo	DAU	-		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang sudah menerapkann e-government terintegrasi	95%	95%	75%	95%	3.642.947.279	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transormasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	1. Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah. 2. Meningkatkan Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis E-Government.
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.924.000.000					
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan dan peralatan telekomunikasi yang terpelihara				41 OPD	1.924.000.000	Diskominfo	DAU			
	Jumlah Tersedianya CCTV dan VOIP disetiap OPD				41 OPD						
	Jumlah Tersedianya Akses Internet berkecepatan tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman				5 Mbps Internet, 10 Mbps Metro Per OPD						
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.718.947.279					
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Pengembangan Prasarana Command Center Padang Pariaman				1 Paket Saprass Commad Center	883.550.879	Diskominfo	DAU			
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Akses Disaster Recovery Server/Mirroring Server				6 Rak Server Mirror	73.860.000	Diskominfo	DAU			
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan keamanan informasi				1 Paket CSCU	45.000.000	Diskominfo	DAU			
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pembinaan OPD Locus SPBE				11 OPD	70.493.900	Diskominfo	DAU			

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Implementasi Masterplan Smart City				50%	508.700.000	Diskominfo	DAU			
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana Telekomunikasi dan Sandi				150 Menara	62.342.500	Diskominfo	DAU			
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah data Padang Pariaman Dalam Sebuah Sistem				75%	75.000.000	Diskominfo	DAU			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						60.000.000					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Parsentase pemenuhan data statistik sektoral daerah	15%	50%	75%	95%	60.000.000	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transormasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan data
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000					
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah buku/laporan data statistik sektoral				1 Paket Data Sektoral	60.000.000	Diskominfo	DAU			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						75.000.000					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Parsentase Sistem Informasi Daerah yang telah memiliki keamanan informasi	50%	5%	25%	45%	75.000.000	Diskominfo	DAU	Stabilitas POLHUKHAN KAM dan Transormasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengamanan Informasi
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000					
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Oeperasional dan dukungan persandian untuk pengamanan Informasi					75.000.000	Diskominfo	DAU			
					1 Paket Sarana dan Prasarana Layanan Operasional Persandian Daerah						

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2021 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021. Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.